

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Akuntansi Positif (Positif Accounting Theory)

Teori akuntansi positif disesuaikan dengan keadaan praktik akuntansi yang memiliki ciri pemecahan masalah (*Problem Solving*).¹ Teori akuntansi positif menjelaskan apa dan bagaimana praktik akuntansi tersebut berjalan berdasarkan pengalaman yang dapat diuji secara empiris. Teori akuntansi positif juga menyediakan seperangkat konsep atau prinsip yang luas untuk menjelaskan, yang berarti memprediksi fenomena yang terjadi dan memberikan jawaban kepada praktik akuntansi yang berlaku.

Seiring perkembangan zaman, konsep teori selalu berkembang agar tetap terpelihara sebagai pengetahuan dan relevan untuk pedoman praktik akuntansi. Penelitian empiris mengenai teori akuntansi positif selalu dikembangkan untuk semakin menyesuaikan dengan lingkungan bisnis yang terus menerus berubah. Teori akuntansi positif juga menjelaskan sebuah proses yang menggunakan kemampuan, pemahaman dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling tepat untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang.²

Tujuan utama dari teori akuntansi positif sebagaimana diuraikan sebelumnya adalah mampu menjelaskan dan memprediksi praktek akuntansi, dikaitkan dengan perilaku individu dalam memilih metode akuntansi yang bisa memaksimalkan utilitasnya. Untuk bisa memahami kepentingan pihak manajemen dalam pelaporan keuangan, maka perlu untuk mengapresiasi konsep konsekuensi ekonomi.

Teori akuntansi positif dalam penelitian ini mencoba untuk memahami dan memprediksi kebijakan akuntansi pondok pesantren. Kebijakan akuntansi secara umum ditentukan oleh struktur organisasi pondok pesantren itu sendiri, yang dipengaruhi oleh lingkungan dimana pondok pesantren itu berada. Dengan demikian pemilihan metode

¹ Watts & Zimmerman, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 129.

² *Ibid*, n.d., hal. 130-131.

akuntansi yang akan digunakan merupakan bagian dari seluruh proses tata kelola pondok pesantren.

B. Teori Akuntansi dan Entitas Pesantren

1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi menurut komite istilah American Institute Of Certified Public Accounting (AICPA) adalah sebuah seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.³ Akuntansi juga diartikan sebagai suatu kegiatan jasa, fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat financial kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut yang dimaksudkan untuk pengambilan ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa alternatif.⁴

Akuntansi berada di garis depan dan memainkan peran penting dalam pengoperasian ekonomi dan sosial. Keputusan individu, pemerintah, dan dunia usaha ditentukan oleh bagaimana sumber daya suatu bangsa digunakan. Rudianto mengartikan akuntansi kegiatan pengumpulan, analisis, kuantifikasi, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan kegiatan dan transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan. Akuntansi juga dapat didefinisikan sebagai suatu sistem informasi yang menyediakan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan situasi suatu perusahaan.⁵

2. Pengertian Akuntansi Syariah

Definisi akuntansi syariah adalah suatu kegiatan pencatatan, penggolongan serta pengikhtisaran transaksi yang menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang sebelumnya diidentifikasi melalui transaksi. Sedangkan definisi dari syariah adalah aturan yang bersumber dari Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalankan segala aktivitas

³ Harahap, *Teori Akuntansi, edisi revisi 2011*, bk. 5.

⁴ Harahap, *Teori Akuntansi, edisi revisi 2011*.

⁵ Rudianto, *Pengantar Akuntansi : Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan* (Jakarta: Erlangga, 2012), 16.

hidupnya di dunia. Dapat disimpulkan bawa akuntansi syariah sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.⁶

3. Entitas Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia dan didirikan oleh para penyebar Islam sebagai landasan pendidikan Islam. Oleh karena itu, kemunculannya bertepatan dengan dakwah Islam dan proses Islamisasi di Indonesia.⁷ Pondok Pesantren pertama kali muncul di Indonesia pada abad ke-16 di Ampel Denta di bawah pimpinan Sunan Ampel. Sunan Ampel mengumpulkan kader santri untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh plosok negeri bahkan hingga ke negara tetangga. Dari santri sunan ampel inilah kemudian mendirikan pesantren di seluruh tanah air.⁸

Usman mengartikan pesantren sebagai lembaga pendidikan untuk pengkajian, pemahaman, pendalaman, penghyatan, dan pengamalan ajaran islam, serta menekankan pentingnya akhlak agama sebagai pedoman berperilaku sehari-hari.⁹ Oleh karena itu, diketahui bahwa tujuan utama didirikannya pesantren adalah untuk mempelajari ilmu-ilmu agama (Tauhid, Fiqih, Ushr Fiqh, Tafsir, Hadits, Akhlaq, Tasawuf, Bahasa Arab, dan lain-lain). Serta mendidik santri untuk berperilaku baik. Standar Akuntansi Pesantren mendefinisikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pesantren yang di dalamnya diselenggarakan pendidikan agama Islam, dengan kyai sebagai tokoh sentral dan masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwaanya, dan pembelejaran

⁶ Wasilah Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, 3 ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2019), bk. 54–55.

⁷ muh. idris usman, “Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam” XIV (2013): 101–19.

⁸ Ahmad Muhakamurrohman, “Pesantren: Santri, Kiai, Dan Tradisi,” *IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 12, no. 2 (1970): 109–18, <https://doi.org/10.24090/ibda.v12i2.440>.

⁹ muh. idris usman, “Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam.”

agama Islam dibawah bimbingan kyai merupakan kegiatan utama bagi santri.¹⁰

Pedoman Akuntansi Pesantren Menyebutkan bahwa peraturan menteri agama Nomor 3 Tahun 1979 mengklasifikasikan tipe pondok pesantren menjadi empat yaitu:¹¹

- a. Pondok Pesantren Tipe A, yaitu para santri bertempat tinggal di asrama dan belajar di lingkungan pondok pesantren. Proses belajar mengajar dilakukan secara tradisional (sistem *wetoonan atau sorogan*).
- b. Pondok Pesantren Tipe B, yaitu para santri bertempat tinggal di asrama pondok pesantren sedangkan proses belajar mengajar dilakukan secara klasikal, pengajaran dari kyai bersifat aplikasi dan diberikan pada waktu tertentu.
- c. Pondok Pesantren Tipe C, yaitu para santri bertempat tinggal di pondok pesantren namun proses belajar mengajar dilakukan diluar lingkungan pondok pesantren (di madrasah atau sekolah umum lainnya), kyai hanya mengawasi dan sebagai pembina para santri.
- d. Pondok Pesantren Tipe D, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan sistem pondok pesantren dan sekaligus sistem sekolah atau madrasah.

C. Laporan Keuangan Pesantren

1. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Kasmir mendefinisikan laporan keuangan sebagai laporan yang menyajikan kondisi perubahan saat ini dan perubahannya. Keadaan suatu perusahaan saat ini mengacu pada posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (neraca) dan periode waktu tertentu (laporan laba rugi).¹² Menurut pernyataan Standar Akuntansi

¹⁰ Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan Bank Indonesia (BI), *Buku Pedoman akuntansi Pesantren* (Jakarta: Bank Indonesia, 2018).

¹¹ Pesantren, *Bab I Pendahuluan Pedoman Akuntansi Pesantren*.

¹² kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali, 2010), 86.

Keuangan No 1 Ikatan Akuntansi Indonesia mengatakan bahwa:¹³

“Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan pada mereka”.

Secara umum laporan keuangan disusun dengan tujuan yang sama. Rudianto merinci tujuan penyajian laporan keuangan sebagai berikut:¹⁴

- 1) Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal perusahaan.
- 2) Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi perusahaan yang timbul dalam aktivitas usaha dalam memperoleh laba.
- 3) Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan keuangan untuk mengstimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba di masa depan
- 4) Untuk membrikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan ketika mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasikan laba.
- 5) Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi tentang aktivitas pembiayaan dan investasi.
- 6) Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan

¹³ Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan Bank Indonesia (BI), *Buku Pedoman akuntansi Pesantren*.

¹⁴ Rudianto, *Pengantar Akuntansi : Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*, 20.

yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.

2. Acuan Penyusunan Laporan Keuangan Pesantren

- a. Acuan utama penyusunan laporan keuangan pondok pesantren adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang telah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.
- b. Pedoman Akuntansi Pesantren ini disusun menggunakan acuan sebagai berikut:
 - 1) SAK ETAP yang telah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.
 - 2) PSAK dan ISAK syariah yang telah dikeluarkan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI.
- c. Jika Standar Akuntansi Keuangan memberikan pilihan atas perlakuan akuntansi, maka penyusunan laporan keuangan pondok pesantren harus mengikuti ketentuan yang dipilih dalam Pedoman Akuntansi Pesantren IAI.
- d. Dalam hal terjadi pertentangan antara ketentuan dalam Pedoman Akuntansi Pesantren ini dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, maka laporan keuangan pondok pesantren harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Standar Akuntansi Keuangan.

3. Tujuan Laporan Keuangan yang disusun

- a. Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, arus kas juga informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan ekonomi
- b. Suatu bentuk pertanggungjawaban pengurus yayasan pondok pesantren atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

4. Pencatatan Pelaporan Keuangan Dalam Perspektif Islam

Allah telah memerintahkan kita melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan. perintah tersebut telah ada didalam Al-Qur'an, diantaranya sebagai berikut :

a. Q.s. Al-Baqarah (2) ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
 فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا
 فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُجِزَ هُوَ
 فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
 رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ ؕ وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
 فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ
 تَكُفُّوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ
 وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
 شَهِيدٌ ؕ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوفَ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada orang lelaki, maka (boleh)

seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Dari ayat di atas, Harahap mengungkapkan bahwa Islam mempunyai definisi tentang prinsip keadilan, kebenaran, dan legitimasi. Ayat 282 juga menunjukkan bahwa tujuan utama pencatatan transaksi keuangan suatu organisasi atau kegiatan yang berkaitan dengan keuangan adalah untuk kebenaran, kejujuran, dan transparansi bagi pemangku kepentingan.¹⁵ Konsep ini selaras dengan tujuan dikeluarkannya Pedoman Akuntansi Pesantren untuk memudahkan pondok pesantren menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.

¹⁵ Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

b. Q.S> Asy-Syu'ara (26) Ayat 181-184

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ ١٨١ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
الْمُسْتَقِيمِ ۝ ١٨٢ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ ۝ ١٨٣ وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ ۝ ١٨٤﴾

Artinya : “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia padahak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu”.

Kebenaran dan keadilan pengukuran yang dimaksud dengan pengukuran harta, kewajiban, modal, pendapatan, beban dan keuntungan. Oleh karena itu, akuntan mempunyai tugas untuk mengukur aset secara adil dan akurat. Saat mengajukan laporan keuangan, akuntan mengumpulkan bukti tentang suatu organisasi yang dijalankan oleh tim manajemen yang telah dibentuk sebelumnya. Manajemen mempunyai hak untuk melakukan apapun yang diinginkannya, tergantung pada kewenangannya untuk menyiapkan laporan keuangan. Ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat disalahgunakan oleh kepentingan manajemen. Oleh karena itu, organisme memerlukan akuntansi independen untuk mengaudit laporan keuangan beserta bukti-buktinya. Ilmu auditing menjelaskan tentang metode, teknik, dan strategi yang digunakan dalam mengaudit laporan keuangan.

c. Q.S Al-Israa' (17) Ayat 35

﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا ۝ ٣٥﴾

Artinya : “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang

benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan bahwa pengukuran harus diselesaikan dalam bentuk pos-pos yang sudah dimasukkan dalam neraca. Hal ini dilakukan untuk memenuhi standar dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kebenaran. Menyempurkan takaran atau timbangan dalam ayat diatas tersebut dinyatakan lebih utama dan lebih baik akibatnya karena memebrikan rasa aman dari kepercayaan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Masing-masing pihak yang berkepentingan menerima secara adil hak-hak mereka.

D. Pedoman Akuntansi Pesantren

1. Pengertian Pedoman Akuntansi Pesantren

Pedoman Akuntansi Pesantren merupakan standar khusus untuk pesantren. Karakteristik pesantren berbeda dengan organisasi bisnis yang berorientasi untuk memperoleh laba. Perbedaan ini terletak pada cara pesantren memperoleh sumber daya untuk aktivitas operasionalnya. Pesantren memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut.

Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam pesantren timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis, contohnya penerimaan sumbangan. Pada beberapa bentuk organisasi nirlaba meskipun tidak ada kepemilikan, organisasi tersebut mencukupi modalnya dari hutang dan mendanai kegiatan operasionalnya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya pengukuran jumlah saat dan kepastian aliran pemasukan kas menjadi ukuran kinerja yang penting bagi para pengguna laporan keuangan organisasi tersebut, seperti pemasok dan kreditur dana lainnya.¹⁶

¹⁶ Dewan Standar Akuntansi Keuangan, “Draf Eksposur ISAK 35,” 2018, 1–34.

Pedoman Akuntansi Pesantren bertujuan untuk memberikan panduan akuntansi yang tidak mengikat bagi pesantren dalam penyusunan laporan keuangan. Pedoman akuntansi pesantren diterapkan bagi pesantren yang telah menjadi bahan hukum berupa yayasan. Penerapan pedoman akuntansi pesantren ke dalam pesantren dapat dilihat dengan 3 aspek yaitu:

a. Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan merupakan proses mengakui transaksi yang dapat dicatat dalam laporan keuangan. Pengukuran merupakan proses penetapan nilai nominal mata uang terhadap sebuah transaksi yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Sehingga pengakuan dan pengukuran merupakan proses mengakui transaksi beserta penetapan nominal mata uang untuk dicatat di dalam laporan keuangan.

b. Penyajian

Penyajian merupakan proses menyajikan transaksi ke dalam laporan keuangan.

c. Pengungkapan

Pengungkapan merupakan proses mengungkapkan informasi yang ditampilkan di dalam laporan keuangan.

2. Laporan Keuangan Berdasarkan PAP Yang Mengacu Pada ISAK

Efektif tanggal 1 januari 2020, penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba tidak lagi mengacu pada PSAK 45 yang menjelaskan tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba melainkan mengacu pada ISAK 35, Penyajian Laporan Keuangan. laporan dari organisasi nirlaba PSAK 35 sudah tidak berlaku lagi dan tidak lagi tersedia di PPSAK 13 karena PSAK sudah tidak berlaku lagi. Sebaliknya, DSAK IAI menerbitkan ISAK 35 yang mulai berlaku bersamaan pada tanggal 1 januari 2020. Oleh karena itu, lembaga-lembaga yang bergerak di sektor nirlaba, seperti yayasan hendaknya segera melakukan penyesuaian.

Salah satu perbedaan mendasar antara ISAK 35 dan PSAK 45 adalah Neraca, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan laporan keuangan organisasi nirlaba menurut ISAK 35 adalah (1) Laporan Posisi Keuangan (2) Laporan

Penghasilan Komperhensif (3) Laporan Perubahan Aset Netto (4) Laporan Arus Kas (5) Catatan Atas Laporan Keuangan.

a. Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan merupakan daftar status sumber daya yang perusahaan dimana sumber tersebut tersedia.¹⁷ Laporan posisi keuangan memberikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan set neto dari yayasan pondok pesantren serta hubungan antara unsur-unsur tersebut pada suatu waktu tertentu. Penyajian laporan keuangan pesantren adalah sebagai berikut.¹⁸

- 1) Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya dan dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar.
- 2) Liabilitas disajikan menurut urutan jatuh temponya dan dikelompokkan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.
- 3) Aset neto disajikan menjadi aset neto tidak terikat, aset neto terikat temporer, dan aset neto terikat permanen.

b. Laporan Penghasilan Komperhensif

ISAK 35 menggunakan istilah “Laporan Penghasilan Komprehensif” bukan lagi disebut istilah “Laporan Aktivitas” dalam versi PSAK 45. Laporan Penghasilan Komprehensif menggambarkan kenaikan atau penurunan manfaat ekonomi organisasi nirlaba yang dihasilkan dari pendapatan, pendapatan dan pengeluaran atau pengeluaran. Laporan penghasilan komprehensif dibagi kedalam dua bagian sesuai dengan klasifikasi aset neto : (1) Tanpa Pembatas dari Pemberi Sumber Daya, dan (2) Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya¹⁹

c. Laporan Perubahan Aset Neto

Istilah Lpaoran Perubahan Aset Neto adalah bentuk penyesuaian dari sitilah Laporan Perubahan

¹⁷ Rudianto, *Pengantar Akuntansi : Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*, 43.

¹⁸ Pesantren, *Bab I Pendahuluan Pedoman Akuntansi Pesantren*.

¹⁹ Dewan Standar Akuntansi Keuangan, “Draf Eksposur ISAK 35.”

Ekuitas pada laporan keuangan entitas bisnis. Aset neto dalam entitas nonlaba diklasifikasikan menjadi 2 yaitu :

- 1) Aset Neto Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya
- 2) Aset Neto Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber daya

d. Laporan Arus Kas

laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan keluar suatu perusahaan selama suatu periode akuntansi. Laporan arus kas memberikan informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran dana dari yayasan pondok pesantren dalam kurun waktu tertentu tertentu. Kas dan setara kas dikelompokkan menjadi arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendapatan. Arus kas dari aktifitas perusahaan disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung.²⁰

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan informasi tambahan yang harus disediakan mengenai berbagai hal yang berkaitan langsung dengan laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan tertentu.²¹ Catatan atas laporan keuangan hendaknya disediakan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai dengan bagian-bagian utama laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian-bagian utama laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan mengacu pada pos-pos dalam laporan keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas yang mencakup uraian kualitatif maupun kuantitatif.²²

²⁰ Pesantren, *Bab I Pendahuluan Pedoman Akuntansi Pesantren*.

²¹ Rudianto, *Pengantar Akuntansi : Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*, 20.

²² Pesantren, *Bab I Pendahuluan Pedoman Akuntansi Pesantren*.

3. Komponen Akuntansi Berdasarkan PAP Yang Mengacu Pada ISAK 35

a. Akuntansi Aset

1) Pengertian Aset

Aset adalah sumber daya yang dikelola dan diharapkan diterima oleh pondok pesantren berdasarkan peristiwa masa lalu atau manfaat ekonomi di masa depan yang diperkirakan akan diperoleh yayasan pondok pesantren.²³ Aset ada dua macam yaitu :

a) Aset lancar

Aset yang diperkirakan akan direalisasikan atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam siklus operasional normal dari yayasan pondok pesantren yaitu satu tahun.

b) Aset tidak lancar adalah aset yang bukan termasuk aset lancar

2) Kas dan Setara Kas

Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik rupiah maupun mata uang asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Sebaliknya, setara kas adalah investasi yang sangat likuid, berjangka pendek, dan memungkinkan dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.²⁴

Kas dan setara kas terdiri atas :

a) Kas rupiah dan mata uang asing

b) Giro pada bank

c) Tabungan

d) *Deposit on call*,

e) Deposito berjangka dengan waktu kurang atau sama dengan tiga bulan.

Kas dan setara kas dilaporkan sebagai kelompok aset lancar. Beberapa Hal yang termasuk dalam kas dan setara kas merupakan informasi mengenai jenis dan jumlah kas dan setara kas, serta kas dan setara kas yang penggunaannya dibatasi.

²³ Pesantren.

²⁴ Pesantren.

3) Piutang Usaha

Piutang usaha merupakan tagihan penerimaan kas dan setara kas kepada pihak lain dari yayasan pondok pesantren. Piutang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dilakukan unit usaha pondok pesantren kepada pihak lain. Piutang usaha diakui pada saat barang atau jasa dijual kepada pihak lain sebesar jumlah yang ditagih.²⁵

Piutang usaha dicatat dalam kelompok aset lancar. Penyisihan piutang usaha disajikan sesuai dengan rincian piutang usaha. Hal-hal yang diungkapkan meliputi rincian piutang usaha, terjadinya piutang tak tertagih dan besarnya kenaikan atau penurunan pada tahun berjalan, dan besarnya penyisihan piutang usaha yang tidak tertagih.

4) Persediaan

Persediaan adalah aset yang dapat dijual dalam bentuk bahan dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk dijual, dan dalam penyediaan proses produksi dan jasa. Persediaan muncul dari kegiatan yang dilakukan oleh unit dari yayasan pondok pesantren. Biaya perolehan persediaan dihitung dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang atau metode masuk pertama keluar pertama (FIFO) dan dihitung secara berkala.

Persediaan dilaporkan dalam kelompok aset lancar. Pengungkapan mengenai persediaan mencakup akuntansi yang digunakan untuk menilai persediaan, termasuk formula penetapan biaya yang digunakan, jumlah tercatat persediaan dan klasifikasinya, jumlah persediaan yang dicatat sebagai beban tahun berjalan, serta jumlah penurunan nilai atas persediaan dan pemulihan.

5) Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka merupakan pembayaran biaya dimuka yang manfaatnya akan digunakan dalam periode yang akan datang. Biaya dibayar

²⁵ Pesantren.

dimuka berfungsi untuk membiayai operasional yayasan pondok pesantren dan unit usahanya. Misalnya, biaya sewa uang dibayar dimuka. Biaya dibayar dimuka diakui pada saat dilakukan pengeluaran uang namun jasa/manfaatnya belum diterima, sebesar jumlah yang dibayarkan.²⁶ Biaya dibayar dimuka disajikan dalam kelompok aset lancar. Hal-hal yang diungkapkan yaitu rincian biaya dibayar dimuka.

6) Aset Lancar Lain

Aset lancar lain adalah aset lancar yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos lancar yang ada dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri. Komponen aset lain yang material disajikan dalam pos aset lancar yang berbeda. Batasan materialitas penyajian terdiri dari 5% dari nilai aset keseluruhan.²⁷

Saat diperoleh, aset lancar lain diakui sebesar biaya perolehan. Selain itu, pengakuannya dihentikan pada saat aset digunakan. Kelompok aset lancar menampilkan aset lancar tambahan. Hal diungkapkan yaitu rincian dari aset lancar lain.²⁸

7) Investasi Pada Entitas Lain

Investasi pada entitas lain merupakan penamaan dana dalam bentuk kepemilikan saham pada entitas lain. Investasi pada entitas lain misalnya, berarti memiliki saham perusahaan yang dimiliki oleh yayasan pondok pesantren. Pengertian investasi pada entitas lain tidak termasuk koperasi yang dimiliki oleh individu, bukan oleh yayasan pondok pesantren. Investasi pada entitas lain disajikan kedalam aset tidak lancar.²⁹

8) Properti Investasi

Properti investasi adalah tanah dan bangunan yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan sewa,

²⁶ Pesantren.

²⁷ Pesantren.

²⁸ Pesantren.

²⁹ Pesantren.

peningkatan nilai, atau keduanya, tetapi tidak digunakan untuk menyediakan jasa atau administrasi, atau dijual dalam bisnis sehari-hari. setelah properti digunakan untuk kegiatan operasional yayasan pondok pesantren, properti ditransfer dari pos properti investasi ke pos aset tetap. Properti investasi disajikan dalam kelompok aset tidak lancar.³⁰

9) Aset tetap

Aset tetap adalah aset yang dapat digunakan untuk menyediakan jasa, disewakan kepada pihak lain untuk tujuan administratif atau digunakan selama lebih dari satu waktu.³¹

Aset tetap dikelompokkan sebagai berikut :

- a) Tanah,
- b) Bangunan,
- c) Kendaraan,
- d) Komputer,
- e) Furnitur,
- f) Lain-lain.

Biaya perolehan aset tetap terdiri dari harga perolehan yang mencakup pajak pembelian, biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk mengangkut aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan, dan perkiraan awal waktu pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi aset. Biaya perolehan aset tetap yang berasal dari sumbangan dari pihak lain adalah sebesar nilai wajarnya. Aset tetap selain tanah disusutkan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaatnya. Sedangkan aset tetap tanah tidak disusutkan.

10) Aset tidak berwujud

Aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik disebut aset tidak berwujud. Perolehan aset tidak berwujud dari pihak luar yayasan pondok pesantren termasuk aplikasi komputer yang dibeli dari pihak lain..³²

³⁰ Pesantren.

³¹ Pesantren.

³² Pesantren.

11) Aset tidak lancar lain

Aset tidak lancar lain adalah aset tidak lancar yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok aset tidak lancar yang ada dan tidak perlu disajikan dalam pos aset lancar tersendiri.

Saat diperoleh, aset tidak lancar lainnya diakui sebesar biaya perolehan. Saat digunakan, pengakuannya juga dihentikan. Dalam kelompok aset tidak lancar, disajikan aset tidak lancar lainnya. Hal yang perlu diungkapkan yaitu rincian dari aset tidak lancar lain serta pengungkapan lainnya.³³

b. Akuntansi Liabilitas

1) Pengertian Liabilitas

Liabilitas adalah kewajiban masa kini yang berasal dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diperkirakan akan menghasilkan pengeluaran ekonomi dari sumber daya yayasan pondok pesantren. Karakteristik dasar liabilitas adalah mempunyai kewajiban di masa kini. Tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu merupakan kewajiban.³⁴ Liabilitas dibagi menjadi dua yaitu :

- a) Liabilitas jangka pendek adalah liabilitas yang diperkirakan akan diselesaikan oleh yayasan pondok pesantren selama siklus operasi normal, liabilitas untuk tujuan diperdagangkan, liabilitas jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan, atau liabilitas yang yayasan pondok pesantren tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menangguhkan penyelesaiannya selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.
- b) Liabilitas jangka panjang adalah liabilitas yang tidak masuk dalam liabilitas jangka pendek.

2) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka adalah penerimaan kas dan setara kas dari penjualan barang

³³ Pesantren.

³⁴ Pesantren.

dan jasa atas penjualan barang dan penyediaan jasa yang belum dilakukan. Misalnya sewa diterima dimuka. Pendapatan yang diterima dimuka tidak dapat diakui sebagai pendapatan. Jika penjualan barang dan jasa dilakukan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan maka pendapatan dimuka disajikan dalam liabilitas jangka pendek. Jika lebih lama, pendapatan ini disajikan dalam liabilitas jangka panjang.³⁵

Saat penerimaan dilakukan, pendapatan dimuka dicatat sebagai total. Pada akhir tahun buku, pendapatan diterima dimuka yang sudah diakui sebagai pendapatan disesuaikan. Hal-hal yang diungkapkan yaitu rincian dari pendapatan diterima dimuka serta pengungkapan lain.

3) Utang Jangka Pendek/Panjang

Pengertian dari utang jangka pendek adalah kewajiban untuk menyerahkan kas dan setara kas kepada pemberi pinjaman selama periode hingga dua belas bulan setelah periode pelaporan. Jika periode melebihi dua belas bulan, maka disebut sebagai utang jangka panjang. Utang jangka panjang/pendek muncul dari transaksi di pondok pesantren maupun unit usahannya. Utang jangka panjang/pendek yang dimaksud merupakan pinjaman tanpa bunga.³⁶

Utang jangka pendek/panjang dapat diakui jika diterimanya dana dari pihak lain sebesar jumlah dana yang diterima. Dan dihentikan pengakuannya jika dilunasi secara bertahap maupun sekaligus. Utang jangka pendek disajikan dalam kelompok liabilitas jangka pendek. Sedangkan utang jangka panjang disajikan dalam kelompok liabilitas jangka panjang. Hal-hal yang diungkapkan dari utang jangka pendek/panjang adalah rincian utang jangka pendek/panjang, jumlah waktu, dan pihak yang memberikan pinjaman. Selanjutnya rincian utang

³⁵ Pesantren.

³⁶ Pesantren.

jangka panjang diklasifikasikan ke utang jangka pendek serta pengungkapan lainnya.

4) Liabilitas Jangka Pendek Lain

Liabilitas jangka pendek lain adalah liabilitas jangka pendek yang diakui pada saat terjadi sebesar jumlah yang harus diselesaikan dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri. Liabilitas diakui jika terjadi sebesar jumlah yang harus diselesaikan, dan dihentikan pengakuannya pada saat diselesaikan. Liabilitas jangka pendek lain disajikan dalam kelompok liabilitas jangka pendek. Hal-hal yang diungkapkan yaitu rincian dari liabilitas jangka pendek lain dan pengungkapan lain.³⁷

5) Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja merupakan seluruh imbalan yang diberikan pegawai pondok pesantren dan badan usahanya atas jasa yang diberikan oleh pegawai yang bersangkutan.³⁸ Liabilitas imbalan kerja terdiri atas :

- a) Liabilitas imbalan kerja jangka pendek.
- b) Liabilitas imbalan kerja pascakerja.
- c) Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lain.
- d) Liabilitas pesangon pemutusan kerja

Liabilitas imbalan kerja diakui pada saat pegawai telah memberikan jasanya kepada yayasan pondok pesantren dalam suatu periode tertentu. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek dan imbalan pesangon pemutusan kerja diakui sebesar jumlah yang harus dibayarkan dan liabilitas imbalan kerja pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lain diakui sebesar jumlah yang telah didiskonto. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek dan imbalan pesangon pemutusan kerja disajikan dalam kelompok liabilitas jangka pendek. Liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lain disajikan dalam kelompok liabilitas jangka panjang.

³⁷ Pesantren.

³⁸ Pesantren.

6) Liabilitas Jangka Panjang Lain

Liabilitas jangka panjang lain merupakan liabilitas jangka panjang yang tidak dapat digolongkan dalam kelompok pos liabilitas jangka panjang yang ada dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri. Liabilitas jangka panjang lain dicatat sebesar jumlah yang harus dibayar pada saat terjadinya. Pengakuannya berhenti ketika sudah diselesaikan. Liabilitas jangka panjang lain disajikan pada kelompok liabilitas jangka panjang. Pengungkapannya mencakup data mengenai liabilitas jangka panjang lainnya dan pengungkapan lainnya.³⁹

c. Aset Neto

Dalam laporan keuangan komersial, aset neto dikenal sebagai modal. Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan pada ada atau tidaknya oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Aset neto berdasarkan kondisi yang melekat pada sumber daya menjadi dua klasifikasi aset neto yaitu:

1) Aset Neto Tanpa Pembatasan (*without restrictions*)

Aset neto tanpa pembatasan adalah aset neto yang tidak ada batasan terhadap aset tersebut, misalnya sumbangan yang diberikan oleh si donatur, dimana donatur tidak secara jelas mencantumkan jangka waktu dari donasinya tadi hanya untuk memberikan donasi untuk entitas tersebut sehingga pemasukan dan pengeluaran yang berhubungan dengan entitas dapat mempergunakannya untuk kebutuhan entitas.⁴⁰

2) Aset Neto Pembatasan (*with restrictions*)

Aset neto dengan pembatasan, menggabungkan klasifikasi aset neto terikat permanen dan aset neto terikat temporer menjadi aset neto dengan pembatasan akan mengurangi kompleksitas. Aset neto dengan pembatasan adalah aset neto yang berkaitan dengan sumber daya berupa aktivitas

³⁹ Pesantren.

⁴⁰ Dewan Standar Akuntansi Keuangan, "Draf Eksposur ISAK 35."

operasi tertentu, investasi untuk jangka waktu tertentu, dan aset neto yang digunakan untuk selamanya, seperti tanah dan bangunan yang diberikan untuk tujuan tertentu, sehingga pemasukan dan pengeluarannya itu diluar seperti kas anak yatim, kas fakir miskin dan lain-lain.⁴¹

d. Akuntansi Penghasilan dan Beban

Penghasilan merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan aset neto.⁴² Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas dan beban dari yayasan pondok pesantren diklasifikasikan menjadi :

- a) Penghasilan dan beban tidak terikat.
 - b) Penghasilan dan beban terikat.
- 1) Penghasilan dan Beban Tidak Terikat

Penghasilan tidak terikat merupakan penghasilan yang tidak ada pembatasan tujuan dan/atau waktu. Penghasilan tidak terikat antara lain terdiri atas :

 - a) Kontribusi dari santri.
 - b) Hibah dari pendiri dan pengurus yayasan.
 - c) Bantuan dari pemerintah, korporasi, dan masyarakat yang tidak ada pembatasannya.
 - d) Aset neto terikat yang berakhir pembatasannya.
 - e) Pendapatan terikat lain.
 - 2) Penghasilan dan Beban Terikat

Penghasilan terikat merupakan penghasilan yang ada pembatasan tujuan dan/atau waktu. Penghasilan terikat terdiri atas :

 - a) Penerimaan wakaf, berupa uang wakaf, harta bergerak selain uang, dan wakaf harta tidak

⁴¹ Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

⁴² Pesantren, *Bab I Pendahuluan Pedoman Akuntansi Pesantren*.

bergerak, serta hasil bersih dari pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

- b) Bantuan dari pemerintah, korporasi, dan masyarakat yang ada batasan penggunaannya.
- c) Pendapatan terikat lainnya.

Penghasilan terikat diakui pada saat timbulnya jumlah yang berkaitan dengan pondok pesantren. Penghasilan dan beban terikat disajikan pada kelompok aktivitas tidak terikat. Pengungkapannya mencakup rincian penghasilan dan beban terikat, aset neto terikat yang berakhir pembatasannya, serta pengungkapan lain.⁴³



⁴³ Pesantren.

4. Contoh Laporan Keuangan Berdasarkan PAP Dengan Mengacu Pada ISAK 35

1. Contoh Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PAP Yang Berkaitan Dengan ISAK 35

Tabel 2.1

Contoh Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PAP Yang Berkaitan Dengan ISAK 35

ENTITAS XYZ		
Laporan Posisi Keuangan		
Pada Tanggal 31 Desember 20XX dan 20XX		
	20XX	20XX
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Setara kas	x	x
Piutang bunga	x	x
Investasi jangka pendek	x	x
Aset lancar lain	x	x
Total aset lancar	xxx	xxx
Aset tidak lancar		
Properti Investasi	x	x
Investasi jangka panjang	x	x
Aset tetap	x	x
Total aset tidak lancar	xxx	xxx
Total aset	xxx	xxx
LABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Pendapatan diterima dimuka	x	x
Utang jangka pendek	x	x
Total liabilitas jangka pendek	xxx	xxx
Liabilitas jangka panjang		
Utang jangka panjang	x	x
Liabilitas imbalan kerja	x	x
Total liabilitas jangka panjang	xxx	xxx
Total liabilitas	xxx	xxx

2. Contoh Laporan Penghasilan Komprehensif Berdasarkan PAP Dengan Mengacu Pada ISAK 35

Tabel 2.2

Contoh Laporan Penghasilan Komprehensif Berdasarkan PAP Yang Berkaitan Pada ISAK 35

ENTITAS XYZ		
Laporan Penghasilan Komprehensif		
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20XX dan 20XX		
	20XX	20XX
TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMER DAYA		
Pendapatan		
Sumbangan		
Jasa layanan	x	x
Penghasilan investasi jangka pendek	x	x
Penghasilan investasi jangka panjang	x	x
Lain-lain	x	x
Total Pendapatan	x	x
Beban		
Gaji, upah	xxx	xxx
Jasa dan profesional	x	x
Administratif	x	x
Depresiasi	x	x
Depresi	x	x
Lain-lain	x	x
Total Beban	x	x
Kerugian akibat kebakaran	xxx	xxx
Total Beban	xxx	xxx
Surplus (Defisit)	xxx	xxx
DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Pendapatan		
Sumbangan	x	x
Penghasilan investasi jangka panjang	x	x
Total Pendapatan	xxx	xxx
Beban		
Kerugian akibat kebakaran	x	x
Surplus (Defisit)	x	x
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	xxx	xxx
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	xxx	xxx

F1

ENTITAS XYZ		
Laporan Perubahan Aset Neto		
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20XX dan 20XX		
	20XX	20XX
ASET NETO TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	x	x
Surplus tahun berjalan	x	x
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan	x	x
Saldo akhir	xxx	xxx
Penghasilan komprehensif lain		
Saldo awal	x	x
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	x	x
Saldo akhir	x	x
Total	x	x
ASET NETO DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	x	x
Surplus tahun berjalan	x	x
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan	(x)	(x)
Saldo akhir	x	x
TOTAL ASET NETO	xxx	xxx

4. Contoh Laporan Arus Kas Berdasarkan PAP Dengan Mengacu Pada ISAK 35

Tabel 2.4
Contoh Laporan arus Kas Berdasarkan PAP Yang Berkaitan Dengan ISAK 35

ENTITAS XYZ		
Laporan Arus Kas		
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20XX dan 20XX		
	20XX	20XX
AKTIVASI OPERASI		
Kas dan sumbangan	x	x
Kas dan pendapatan jasa	x	x
Bunga yang diterima	x	x
Penerimaan lain-lain	x	x
Bunga yang dibayarkan	x	x
Kas yang dibayarkan kepada karyawan	x	x
Kas neto dari aktivasi operasi	xxx	xxx
AKTIVASI INVESTASI		
Ganti rugi dari asuransi kebakaran	x	x
Pemberian peralatan	(x)	(x)
Penerimaan dari penjualan investasi	x	x
Pembelian investasi	(x)	(x)
Kas neto yang digunakan untuk aktivasi investasi	xxx	xxx
AKTIVSI PENDANAAN		
Penerimaan dari sumbangan yang dibatasi untuk :		
Investasi dalam dana abadi (<i>endowment</i>)	x	x
Investasi bangunan	xxx	xxx
Aktivasi pendanaan lain :		
Bunga dibatasi jangka panjang	(x)	(x)
Pembayaran liabilitas jangka panjang	(x)	(x)
Kas neto yang digunakan untuk investasi pendanaan	(xxx)	(xxx)
Kenaikan (Pemurunan) Neto Kas dan Setara Kas	xxx	xxx
Kas dan Setara Kas Pada Awal Periode	xxx	xxx
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Periode	xxx	xxx

5. Contoh Catatan Atas Laporan Keuangan Berdasarkan PAP Yang Berkaitan Dengan ISAK 35

Catatan A menjelaskan kebijakan pengungkapan yang diperlukan agar Catatan B mengikat. Catatan C, D, dan E berisi informasi yang dianjurkan untuk diungkapkan oleh organisasi nirlaba. Semua jumlahnya dalam jutaan rupiah.

Catatan A

Entitas memberikan pendanaan (hibah/wakaf) berupa kas atau aset lainnya atau target pendanaan dengan pembatasan, jika pembatasan tersebut berlaku pada target persyaratan pendanaan baik untuk penggunaan aset atau atas manfaat ekonomik masa depan yang diperoleh dari aset tersebut. Jika pembatasan telah kadaluwarsa atau batasan telah dipenuhi, maka aset neto dengan pembatasan diklasifikasikan kembali menjadi aset neto tanpa pembatasan dan disajikan pada laporan entitas perubahan aset neto sebagai aset neto yang dibebaskan dari pembatasan.

Entitas memberikan hibah atau wakaf, berupa tanah, bangunan dan peralatan sebagai sumbangan tanpa pembatasan, kecuali terdapat pembatasan yang secara khusus menyatakan tujuan properti aset atau penggunaan untuk manfaat ekonomi sumber daya. Hibah atau wakaf untuk aset tetap dengan pembatasan secara eksplisit yang menyatakan tujuan pemanfaatan aset tersebut dan sumbangan berupa kas atau aset lain yang harus digunakan untuk memperoleh aset tetap disajikan sebagai sumbangan dengan pembatasan. Jika pemberi sumbangan tidak mempunyai batasan secara yang jelas mengenai jangka waktu penggunaan aset tetap tersebut, pembebasan pembatasan dilaporkan jika saat aset tetap tersebut dimanfaatkan.⁴⁴

⁴⁴ Dewan Standar Akuntansi Keuangan, "Draf Eksposur ISAK 35."

Catatan B

Aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya yang dibatasi tujuan atau periodenya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Catatan B

	Jumlah
Ditunjukkan untuk tujuan tertentu	
Aktivitas Program A	
Pembelian peralatan	xxx
Penelitian	xxx
Seminar dan publikasi	xxx
Aktivitas program B	
Perbaikan kerusakan peralatan	xxx
Seminar dan publikasi	xxx
Aktivitas program C	
Umum	xxx
Bangunan dan peralatan	xxx
Perjanjian perwalian tahunan	xxx
	xxx
Ditunjukkan untuk periode tertentu	
Untuk periode setelah 31 Desember, 20XX	xxx
Ditunjukkan untuk kebijakan pembelanjaan dan apropriasi (<i>subject to spending policy and appropriation</i>)	
Investasi tahunan, penghasilannya dibelanjakan untuk mendukung:	
Aktivitas program A	xxx
Aktivitas program B	xxx
Aktivitas program C	xxx
Aktivitas lain entitas	xxx
	xxx
Ditunjukkan untuk apropriasi dan pengeluaran ketika peristiwa tertentu terjadi (<i>subject to appropriation and expenditure when a specified event occurs</i>)	
Dana yang pebhasilannya untuk ditambahkan pada jumlah sumbangan awal hingga mencapai nilai Rp. Xxxx	xxx
Polis asuransi kematian dimana terdapat penerimaan ganti rugi asuransi atas kematian pihak yang diasuransikan untuk mendanai aktivitas umum	xxx
	xxx
Tidak ditunjukkan untuk apropriasi atau pengeluaran (<i>not subject to appropriation or expenditure</i>)	
Tanah yang harus digunakan untuk area rekreasi	xxx
Total aset neto dengan pembatasan	xxx

Catatan C

Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan pemberi sumber daya karena terjadinya beban tertentu yang memenuhi tujuan pembatasan atau tercapainya periode waktu atau kejadian lain yang disyaratkan oleh pemberi sumber daya.

Tabel 2.6
Catatan C

Tujuan pembatasan yang dipenuhi	
Beban program A	xxx
Beban program B	xxx
Beban program C	xxx
Peralatan yang dibeli dan digunakan untuk program A	xxx
Pembatasan waktu yang dipenuhi :	
Jangka waktu yang telah dipenuhi	xxx
Kematian pemberi sumber daya tahunan	xxx
	xxx
	xxx
Pembebasan jumlah <i>endowment</i> yang disisihkan <i>appropriated</i> tanpa pembatasan tujuan	
Pembatasan jumlah <i>endowment</i> yang disisihkan <i>appropriated</i> dengan pembatasan tujuan	xxx
Total pembatasan yang dibebaskan	xxx

Sumber : ISAK 35, (2020)

Catatan D

Investasi dicatat pada nilai wajar. Entitas menginvestasikan kelebihan kas diatas kebutuhan harian dalam investasi jangka pendek. Pada tanggal 31 desember 20XX, Rp.XX diinvestasikan pada investasi lancar dan menghasilkan Rp.XX per tahun. Sebagian besar investasi jangka panjang dibagi kedalam dua kelompok. Kelompok A adalah dana abadi (*donor-restricted endowment*) dan tidak diwajibkan untuk menaikkan nilai bersihnya. Kelompok B adalah jumlah

yang oleh badan perwalian ditunjukkan untuk investasi jangka panjang. Tabel berikut ini menunjukkan investasi jangka panjang entitas.⁴⁵

Tabel 2.7
Catatan D

	Kel A	Kel B	Lain- lain	Total
Investasi awal tahun	Xxx	xxx	xxx	xxx
Hibah tersedia untuk investasi :	Xxx	-	xxx	xxx
Untuk dana abadi (<i>endowment</i>)	-	-	xxx	xxx
Untuk dana perwalian tahunan				
Jumlah yang ditarik untuk pemberi sumber daya tahunan yang meninggal	Xxx	-	xxx	xxx
hasil investasi (neto, etelah dikurangi beban Rp.XX)	Xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah tersedia untuk operasi tahu berjalan	Xxx	xxx	-	xxx
Penghasilan dana perwalian untuk tahun berjalan dan masa depan	-	-	xxx	xxx
Investasi akhir tahun	Xxx	xxx	xxx	xxx

Sumber : ISAK 35 (2020)

Undang-undang dan peraturan mengizinkan pemerintah untuk menyesuaikan sebanyak mungkin dana abadi (*endowment found*) dengan mempertimbangkan faktor-faktor penting berikut; durasi dan pemeliharaan dana, tujuan dari organisasi nirlaba dan dana tersebut, kondisi ekonomi secara umum, kemungkinan dampak inflasi atau deflasi, perkiraan pengembalian total pendapatan dan penyesuaian investasi, sumber daya lain

⁴⁵ Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

dari organisasi nirlaba dan kebijakan organisasi. Berdasarkan kebijakan pekekuaran dana abadi, Y% dari rata-rata nilai wajar pada akhir 3 tahun sebelumnya disesuaikan, yaitu Rp.XX untuk tahun yang berakhir 31 Des 20XX.⁴⁶

Catatan E

Beban yang terjadi adalah :

Tabel 2.8
Catatan E

	A	Prog rm B	C	Manaje men & Umum	pendan aan	tot al
Gaji, upah	xx xx	xxxx	xx xx	xxxx	xxxx	xx xx
Jasa dan profesion al	xx xx	xxxx	xx xx	xxxx	xxxx	xx xx
Administ ratif	xx xx	xxxx	xx xx	xxxx	xxxx	xx xx
Depresia si	xx xx	xxxx	xx xx	xxxx	xxxx	xx xx
Bunga	-	-	-	xxxx	-	xx xx
Lain-lain	xx xx	xxxx	xx xx	xxxx	xxxx	xx xx
Total Beban	xx xx	xxxx	xx xx	xxxx	xxxx	xx xx

Sumber : ISAK 35 (2020)

E. Penelitian Terdahulu

Teori dan temuan dari berbagai penelitian terdahulu dijadikan acuan dalam penelitian ini. Ini memang perlu dilakukan karena sebagai data pendukung. Menurut penulis, data pendukung yang perlu dijadikan bagian dalam penelitian ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Fokus

⁴⁶ Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

penelitian yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah terkait masalah Implementasi Pedoman Akuntansi Pesantren. Karena buku Pedoman Akuntansi Pesantren masih baru, maka akuntansi pesantren belum banyak diteliti, sehingga peneliti menyelidiki beberapa temuan penelitian dalam bentuk jurnal yang diterbitkan. Adapun penelitian-penelitian terdahulu mengenai implementasi penerapan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pesantren digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.9
Penelitian terdahulu

N O	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nikmatul Aliyah ⁴⁷	Keisapan Pondok Pesantren Dalam Menerapkan Akuntansi Pesantren (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Al-Karimiyyah)	Kualitatif Deskriptif	Pondok Pesantren Al-Karimiyyah belum melakukan pencatatan akuntansi yang sesuai dengan standar umum. Hanya melakukan pencatatan manual atas semua transaksi yang terjadi.
2.	Nova Santi ⁴⁸	Analisis Pelaporan Yayasan Pondok Pesantren Berdasarkan	Kualitatif Deskriptif	Terdapat komponen Laporan Keuangan yang tidak sesuai dengan standar

⁴⁷ Aliyah, “Kesiapan Pondok Pesantren Dalam Menerapkan Akuntansi Pesantren.”

⁴⁸ Nova Santi, “Analisis Pelaporan Keuangan Yayasan Pondok Pesantren Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren.”

N O	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Pedoman Akuntansi Pondok Pesantren (Studi Pada Az Zahra Islamic Boarding School, Way Huwi, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan)		yang berlaku umum bahkan belum disajikan.
3.	Lukas Pamungkas Suherman ⁴⁹	Analisis Pentingnya Akuntansi Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren Al-Matuq Sukabumi)	Kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Pondok Pesantren Al-Matuq belum menerapkan pedoman akuntansi pesantren maupun PSAK 45 pelaporan keuangan entitas nirlaba.
4.	Irsa Azizah Afkarina ⁵⁰	Rekontruksi Penyusunan Pelaporan Keuangan Di Pondok Pesantren Al-	Kualitatif Deskriptif	Laporan Keuangan yang disusun oleh Pondok Pesantren belum sesuai dengan

⁴⁹ Jurnal, Terapan, dan Suherman, "Analisis Pentingnya Akuntansi Pesantren : Studi pada Pondok Pesantren Al-Matuq Sukabumi."

⁵⁰ Irsa Azizah, *Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember*, 2019.

N O	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Nawari Banyuwangi (Dalam Prespektif Pedoman Akuntansi Pesantren) : Skripsi Univesitas Negeri Jember		Pedoman Akuntansi Pesantren. Pesantren hanya melakukan pencatatan atas penerimaan kas dan pengeluaran kas.
5.	Fitri Nurjamah Lubis, Debby Chyntian Ovani ⁵¹	Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 45 (Studi Kasus : Yayasan Pesantren Al-Husna) :Prosiding Seminar Nasional Dan Expo II Hasil Penelitian Dan	Kualitatif Deskriptif	Yayasan Al-Husna belum menerapkan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 45, kemudian penulis menyarankan dan membuat contoh pembuatan laporan yang sesuai PSAK 45. Hasil penelitianini, Yayasan Pesantren Al-Husna berdasarkan pedoman PSAK

⁵¹ Fitri Nurjannah Lubis dan Debby Chyntia Ovami, “Analisis Penusunan laporan keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) No. 45 (Studi Kasus : Yayasan Pesantren Al-Husna)” 45, no. 45 (2019): 1299–1306.

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Pengabdian Masyarakat 2019		No 45 sesuai dengan informasi yang didapat.
6.	Sonia Mustika Munggaran , Hastuti ⁵²	Penyusunan Sistem Akuntansi Pokok Pondok Pesantren Darul Halim Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren	Kualitatif Deskriptif	Pondok Pesantren Darul Halim belum memiliki sistem akuntansi pokok yang sempurna. Laporan keuangan pun masih sederhana dan tidak sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP).
7.	Ferlinda Ainur Rahemani ⁵³	Pengaruh Pengetahuan Tentang Pedoman Akuntansi Pesantren Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pesantren : <i>Procedding</i>	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan antara tingkat pengetahuan tentang pedoman akuntansi pesantren terhadap penyajian

⁵² Munggaran dan Kunci, “Penyusunan Sistem Akuntansi Pokok Pondok Pesantren Daarul Haliim Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren.”

⁵³ Ferlinda Ainur Rachmani, “Pengaruh Pengetahuan tentang Pedoman Akuntansi Pesantren terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pesantren” 2, no. 2018 (2020): 39–46, <https://doi.org/10.20885/ncf.vol2.art4>.

N O	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		<i>Of National Conference On Accounting & Vinance Vol. 2</i>		laporan keuangan.
8.	Sholikha, Yudha Aryo Sudibyo, Dewi Susilowati ⁵⁴	Fenomena Kualitas Laporan Keuangan Pesantren Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren Dan PSAK Nomor 45: SAR (Soedirman Accounting Review) : <i>Journal Of Accounting And Business</i>	Studi pustaka	Sebagian besar laporan yang disajikan oleh pesantren adalah laporan keuangan yang hanya berupa pengeluaran kas dan diperoleh fakta bahwa sebagian besar pesantren belum menerapkan PSAK 45 dan Pedoman Akuntansi Pesantren dalam penyusutan laporan kauangannya.
9.	Ifa Hanifa Senjiati, Ira Siti Rohmah Maulida, Zaldy Suhatman, Itsnaina	Pengelolaan Dan Penyajian Laporan Keuangan Pesantren Berbasis Akuntansi	Kualitatif Deskriptif	Implementasi penyajian laporan keuangan di indonesia menggunakan PSAK 45, SAK ETAP, dan

⁵⁴ Yudha Aryo Sudibyo, "SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business."

N O	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Lathifah Ridwan ⁵⁵	Syariah : Analisis Kritis Pedoman Akuntansi Pesantren : <i>JRAK (Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi Vol. 11 No. 1</i>		Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) belum di implementasikan dengan baik.
10.	Nurdin, E., Labangu, Y.L, Iffah Zatil Ismah ⁵⁶	Studi Penerapan Akuntansi Pesantren Pada Yayasan Islamic Center Mu'adz Bin Jabal Cabang Kendari : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Volume V/1	Kualitatif Deskriptif	Yayasan Islamic Center Mu'adz Bin Jabal Kendari belum mampu menerapkan Pedoman Akuntansi Pesantren dalam Penyajian Laporan Keuangan berupa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas

⁵⁵ Annafi Indra Tama et al., "Dewan Redaksi Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi" 88349033, no. 83 (n.d.).

⁵⁶ Rosna Kurnia et al., "Evaluasi Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) Pada Yayasan Pondok Pesantren Al-Anshor Kota" 02, no. 02 (n.d.): 1–10.

N O	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				Laporan Keuangan yang disajikan secara tahun berdasarkan tahun hijriyyah atau masehi.

Sumber : Data primer diolah 2023

Penelitian-penelitian di atas dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai penerapan laporan keuangan pondok pesantren berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada objek penelitian, ruang lingkup, dan periode penelitian. Sedangkan persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian ini menggunakan Pedoman Akuntansi Pesantren sebagai acuan dan dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif.

F. Kerangka Berfikir

Berdasarkan informasi yang diperoleh untuk lebih memahami permasalahan yang ada, penulis menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.10
Kerangka Berfikir

